

Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Poopo Barat di Pemilu 2024

Lolita Manurung¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
Email: ¹20606036@gmail.com ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 02, 2025

Accepted July 31, 2025

Published July 31, 2025

Kata Kunci:

Partisipasi Politik,
Pemilu 2024,
Demokrasi Lokal,
Masyarakat Pedesaan,
Desa Poopo Barat



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Poopo Barat, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pemilu 2024, mengeksplorasi situasi politik lokal, tingkat pengenalan terhadap kandidat, dan upaya peningkatan partisipasi. Metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi politik di Desa Poopo Barat relatif stabil dengan penyelenggaraan pemilu yang tertib, namun tingkat partisipasi masyarakat masih memerlukan peningkatan. Masyarakat memiliki pengenalan yang cukup baik terhadap calon presiden, wakil presiden, dan legislatif melalui media televisi, diskusi informal, dan strategi kampanye grassroots. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi, termasuk kampanye penyuluhan politik dan sosialisasi hak-hak politik oleh pemerintah desa. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi politik memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mobilisasi kuantitatif tetapi juga peningkatan kualitas pemahaman politik masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dan kolaborasi multi-stakeholder untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Abstract

This study aims to analyze community participation in the 2024 elections in Poopo Barat Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency. This study explores the local political situation, the level of candidate recognition, and efforts to increase participation. Qualitative methods using in-depth interviews and observation techniques were used to collect data from the village community. The results indicate that the political situation in Poopo Barat Village is relatively stable with orderly election implementation, but the level of community participation still requires improvement. The community has a fairly good understanding of the presidential, vice-presidential, and legislative candidates through television media, informal discussions, and grassroots campaign strategies. Various efforts have been made to increase participation, including political outreach campaigns and the socialization of political rights by the village government. The study concludes that increasing political participation requires a comprehensive approach that not only quantitative mobilization but also improves the quality of community political understanding through civic education and multi-stakeholder collaboration to strengthen democracy at the local level.

Keywords: Political Participation, 2024 Election, Local Democracy, Rural Communities, West Poopo Village

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara, di mana tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi (Huntington & Nelson, 1976). Di

Indonesia, partisipasi pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan legitimasi hasil pemilu dan kualitas representasi politik. Dalam konteks Pemilu 2024, partisipasi masyarakat di berbagai daerah menunjukkan dinamika yang beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik lokal (Sarbaugh, 2023).

Desa Poopo Barat sebagai salah satu wilayah di Indonesia memiliki karakteristik unik dalam pola partisipasi politiknya. Sebagai daerah dengan struktur sosial yang khas dan kondisi geografis tertentu, partisipasi masyarakat Desa Poopo Barat dalam Pemilu 2024 menjadi fenomena menarik untuk dikaji secara mendalam. Studi tentang partisipasi politik di tingkat desa sangat penting karena desa merupakan basis demokrasi terkecil yang mencerminkan dinamika politik grassroot dalam sistem politik nasional (Verba et al., 1995). Pemahaman terhadap pola partisipasi di tingkat desa dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana masyarakat lokal merespons proses demokrasi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pemilu (Liddle & Mujani, 2007).

Penelitian tentang partisipasi politik masyarakat pedesaan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, meskipun kualitas partisipasi tersebut masih menjadi perdebatan (Aspinall & Berenschot, 2019). Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, kondisi ekonomi, dan mobilisasi politik lokal menjadi determinan penting dalam membentuk perilaku pemilih di tingkat desa. Dalam konteks Pemilu 2024, dinamika politik nasional yang semakin kompleks, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat turut memberikan pengaruh terhadap pola partisipasi politik di tingkat desa, termasuk di Desa Poopo Barat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di berbagai konteks. Penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi (2019) menganalisis pola patronase dan mobilisasi pemilih dalam pemilu di Indonesia, menemukan bahwa praktik politik uang dan jaringan patronase masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi partisipasi dan pilihan politik masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran politik masyarakat meningkat, faktor-faktor material dan relasi patron-klien masih memainkan peran penting dalam menentukan tingkat dan kualitas partisipasi politik. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Aspinall dan Sukmajati (2016) yang meneliti tentang politik elektoral di Indonesia pasca-reformasi, mengungkapkan bahwa mekanisme mobilisasi pemilih di tingkat lokal sangat bergantung pada jaringan sosial, tokoh masyarakat, dan struktur kekuasaan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat desa.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Fitriyah (2020) yang mengkaji partisipasi politik perempuan dalam pemilu di daerah pedesaan, menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilu masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, meskipun secara kuantitatif tingkat kehadiran perempuan di TPS cukup tinggi. Studi ini menekankan pentingnya memahami dimensi kualitatif dari partisipasi politik, bukan hanya sebatas tingkat kehadiran pemilih, tetapi juga kualitas pemahaman politik, kebebasan dalam menentukan pilihan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam diskursus politik. Temuan-temuan dari penelitian terdahulu ini memberikan landasan penting untuk memahami kompleksitas partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam konteks sistem demokrasi Indonesia, namun masih terdapat celah penelitian yang perlu dijembatani, khususnya dalam konteks spesifik Pemilu 2024 dan karakteristik unik Desa Poopo Barat.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji partisipasi politik

masyarakat dalam pemilu di Indonesia, masih terdapat kesenjangan pengetahuan (research gap) yang signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan makro atau regional yang menganalisis pola partisipasi dalam skala luas, sehingga kurang mampu menangkap dinamika dan karakteristik spesifik yang terjadi di tingkat desa individual. Penelitian yang fokus pada satu desa tertentu dengan menggunakan pendekatan mikro yang mendalam masih sangat terbatas, padahal setiap desa memiliki konteks sosial, ekonomi, dan politik yang unik yang dapat menghasilkan pola partisipasi yang berbeda. Kedua, sebagian besar studi tentang partisipasi pemilih dilakukan dalam konteks pemilu-pemilu sebelumnya, sementara Pemilu 2024 memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda, termasuk dinamika politik nasional yang berubah, perkembangan teknologi digital yang semakin masif, dan perubahan struktur demografi serta sosial-ekonomi masyarakat pasca-pandemi COVID-19.

Kesenjangan penelitian lainnya terletak pada aspek metodologis dan kedalaman analisis. Kebanyakan penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek kuantitatif partisipasi (tingkat kehadiran pemilih) tanpa mengeksplorasi secara mendalam aspek kualitatif seperti motivasi, proses pengambilan keputusan, pengaruh media sosial, dan dinamika deliberasi politik di tingkat komunitas lokal. Selain itu, penelitian yang secara khusus menganalisis interaksi antara faktor-faktor lokal spesifik (seperti struktur kepemimpinan desa, modal sosial, dan jaringan komunitas) dengan faktor-faktor eksternal (kampanye nasional, isu-isu nasional, dan polarisasi politik) dalam membentuk pola partisipasi masyarakat masih sangat terbatas. Desa Poopo Barat, dengan karakteristik sosial-ekonomi dan politik lokalnya yang spesifik, belum pernah menjadi objek kajian akademis yang komprehensif terkait partisipasi politik dalam pemilu, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus mendalam (in-depth case study) terhadap Desa Poopo Barat dalam konteks Pemilu 2024, yang memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap berbagai dimensi partisipasi politik masyarakat dengan mempertimbangkan konteks lokal yang spesifik. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan data agregat atau sampel regional, penelitian ini akan menggali secara detail bagaimana dinamika politik lokal, struktur sosial masyarakat, peran tokoh masyarakat, dan faktor-faktor kontekstual lainnya berinteraksi dalam membentuk pola partisipasi masyarakat. Pendekatan mikro ini memberikan kedalaman analisis yang lebih kaya dan nuanced, memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena partisipasi politik di tingkat desa yang sering terabaikan dalam studi-studi makro.

Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis tentang pengaruh teknologi digital dan media sosial terhadap partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam konteks Pemilu 2024. Dengan semakin luasnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di daerah pedesaan, termasuk kemungkinan di Desa Poopo Barat, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi mengubah lanskap partisipasi politik, pola komunikasi politik, dan akses masyarakat terhadap informasi politik. Aspek ini merupakan dimensi baru yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks partisipasi politik masyarakat pedesaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak kondisi pasca-pandemi COVID-19 terhadap pola partisipasi politik masyarakat, termasuk perubahan dalam mekanisme sosialisasi politik, kampanye, dan mobilisasi pemilih yang mungkin telah mengalami transformasi akibat pembatasan sosial dan perubahan perilaku masyarakat selama dan setelah pandemi.

Realitas partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di berbagai daerah menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam. Secara nasional, Pemilu 2024 berlangsung dalam konteks politik yang dinamis dengan tingkat polarisasi yang cukup tinggi, di mana isu-isu nasional seperti ekonomi, lapangan kerja, dan masa depan demokrasi menjadi perdebatan

utama. Di tingkat desa, termasuk kemungkinan di Desa Poopo Barat, realitas partisipasi politik sering kali dibentuk oleh kombinasi antara faktor-faktor lokal dan nasional. Masyarakat desa menghadapi tantangan unik dalam berpartisipasi dalam pemilu, mulai dari akses terhadap informasi yang kadang terbatas, pengaruh struktur sosial tradisional yang masih kuat, hingga praktik-praktik politik lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman terhadap realitas ini penting untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik dan memperkuat demokrasi di tingkat grassroot.

Di sisi lain, realitas kontemporer juga menunjukkan bahwa masyarakat desa semakin kritis dan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi melalui berbagai media, termasuk media sosial. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam partisipasi politik di mana masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mobilisasi elit lokal atau tokoh masyarakat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengakses informasi secara mandiri dan membentuk opini politik mereka sendiri. Namun, fenomena ini juga membawa tantangan baru seperti penyebaran informasi yang tidak akurat (hoaks), polarisasi politik yang semakin tajam, dan fragmentasi opini publik. Dalam konteks Desa Poopo Barat, memahami bagaimana masyarakat menavigasi berbagai sumber informasi, membentuk preferensi politik, dan pada akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak dalam Pemilu 2024 menjadi sangat penting untuk memahami dinamika demokrasi di tingkat lokal dan implikasinya bagi sistem politik nasional.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Poopo Barat dalam Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian dalam konteks natural mereka (Creswell, 2014). Metode kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian partisipasi politik karena dapat menangkap kompleksitas motivasi, persepsi, dan dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat di tingkat lokal. Penelitian dilaksanakan di Desa Poopo Barat, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dengan subjek penelitian adalah masyarakat desa tersebut yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait proses pemilu.

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi. Wawancara mendalam merupakan teknik yang sangat efektif untuk menggali informasi detail tentang pengalaman, pandangan, dan motivasi informan terkait partisipasi politik mereka (Kvale & Brinkmann, 2009). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tema-tema yang muncul secara spontan selama proses wawancara. Informan penelitian dipilih dari berbagai lapisan masyarakat Desa Poopo Barat, termasuk tokoh masyarakat, warga biasa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat desa, untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan komprehensif. Observasi juga dilakukan untuk mengamati kondisi sosial-politik desa, dinamika interaksi masyarakat, serta berbagai aktivitas terkait pemilu yang berlangsung di lokasi penelitian.

Data yang terkumpul dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi verbatim dari rekaman wawancara, pembacaan berulang untuk memahami data secara menyeluruh, pengkodean data untuk mengidentifikasi unit-unit makna, pengelompokan kode-kode menjadi tema-tema, dan interpretasi tema-tema

dalam konteks kerangka teoritis dan tujuan penelitian. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan menggabungkannya dengan data observasi. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan memastikan informed consent dari semua informan, menjaga kerahasiaan identitas informan ketika diperlukan, dan memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Situasi Politik dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa situasi politik di Desa Poopo Barat pada periode menjelang dan selama Pemilu 2024 berada dalam kondisi yang relatif stabil dan kondusif. Berdasarkan wawancara dengan Ibu NK sebagai salah satu informan kunci, proses pemilu yang telah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya di desa ini terlaksana dengan baik tanpa adanya konflik signifikan atau gangguan keamanan yang berarti. Stabilitas politik ini menjadi modal penting bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan damai, mencerminkan kematangan politik masyarakat serta efektivitas sistem penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal. Kondisi politik yang stabil juga mengindikasikan adanya kohesi sosial yang relatif kuat di dalam masyarakat Desa Poopo Barat, di mana perbedaan preferensi politik dapat dikelola tanpa menimbulkan perpecahan atau ketegangan sosial yang serius.

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu NC



Sumber: Data Primer

Meskipun situasi politik cenderung stabil, temuan penelitian mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, khususnya terkait Pemilu 2024, masih perlu ditingkatkan. Pernyataan informan menunjukkan adanya kesadaran dari tokoh masyarakat bahwa partisipasi politik di desa ini belum mencapai level optimal yang diharapkan. Rendahnya partisipasi ini dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan multi-dimensi, tidak hanya terkait dengan kehadiran fisik masyarakat di tempat pemungutan suara, tetapi juga menyangkut aspek-aspek kualitatif seperti pemahaman terhadap isu-isu politik, keterlibatan dalam diskusi politik, dan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam sistem demokrasi. Realitas ini sejalan dengan tantangan umum yang dihadapi banyak daerah pedesaan di Indonesia, di mana partisipasi politik sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan kesadaran politik masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan perlunya upaya strategis dan sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat Desa Poopo Barat. Meskipun kondisi politik yang stabil memberikan fondasi yang baik, stabilitas saja tidak cukup untuk memastikan

partisipasi demokratis yang bermakna. Diperlukan intervensi yang lebih intensif dalam bentuk pendidikan politik, sosialisasi hak-hak politik, dan pembangunan kesadaran kritis masyarakat tentang peran mereka dalam proses demokrasi. Selain itu, penting untuk memahami faktor-faktor spesifik yang menghambat partisipasi masyarakat di desa ini, baik yang bersifat struktural seperti akses informasi dan infrastruktur, maupun kultural seperti nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mungkin mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika partisipasi ini, stakeholder terkait dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkuat demokrasi di tingkat grassroots.

b. Pengenalan Masyarakat Terhadap Calon Presiden, Wakil Presiden, dan Calon Legislatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Poopo Barat memiliki tingkat pengenalan yang cukup baik terhadap calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024. Berdasarkan wawancara dengan Ibu TM, informan menyatakan sudah mendengar dan mengenal ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam pemilu. Pengenalan ini diperoleh melalui berbagai saluran informasi, terutama media televisi yang menjadi sumber berita utama bagi masyarakat desa. Akses terhadap informasi melalui media massa menunjukkan bahwa meskipun berada di daerah pedesaan, masyarakat Desa Poopo Barat tidak terisolasi dari perkembangan politik nasional. Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa diskusi informal dengan warga atau tetangga sekitar menjadi cara penting untuk berbagi dan memperoleh informasi tentang para calon, mencerminkan peran modal sosial dan jaringan komunitas dalam proses sosialisasi politik di tingkat lokal.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu TM



Sumber; Data Primer

Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa sebagian masyarakat sudah memiliki pengenalan terhadap calon presiden dan wakil presiden bahkan sebelum mereka secara resmi mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa para calon yang berkompetisi adalah figur-figur publik yang telah memiliki visibilitas tinggi di ranah politik nasional, sehingga masyarakat pedesaan pun sudah familiar dengan mereka. Pengenalan awal ini dapat mempengaruhi persepsi dan preferensi politik masyarakat, karena mereka tidak hanya menilai berdasarkan kampanye dan program yang ditawarkan selama periode pemilu, tetapi juga berdasarkan rekam jejak dan reputasi yang telah terbentuk sebelumnya. Untuk calon legislatif, tingkat pengenalan masyarakat juga tergolong cukup baik, di mana informan menyatakan sudah mengenal para calon legislatif melalui berbagai media dan aktivitas kampanye yang dilakukan di desa.

Strategi kampanye calon legislatif di Desa Poopo Barat menunjukkan pendekatan yang beragam dan adaptif terhadap konteks lokal. Selain menggunakan media konvensional seperti baliho yang dipasang di jalan raya, para calon legislatif juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mengunjungi gereja-gereja dan menghadiri berbagai acara kemasyarakatan di sekitar Poopo. Strategi ini sangat efektif dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi interaksi personal dan kedekatan dengan calon pemimpin. Kehadiran calon legislatif dalam aktivitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai ajang sosialisasi program, tetapi juga membangun relasi personal dan kepercayaan dengan konstituen. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemilu lokal, pendekatan grassroot yang melibatkan interaksi langsung dan pemanfaatan institusi sosial-keagamaan lokal masih menjadi strategi kampanye yang sangat relevan dan efektif. Kombinasi antara media massa, media luar ruang, dan pendekatan personal menciptakan ekosistem informasi politik yang relatif lengkap bagi masyarakat Desa Poopo Barat untuk mengenal dan menilai para calon yang akan mereka pilih.

c. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024

Temuan penelitian mengungkapkan adanya upaya-upaya terstruktur yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Desa Poopo Barat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu MP, direncanakan akan diadakan kampanye penyuluhan politik dan diskusi terbuka mengenai Pemilu 2024, mengikuti pola yang telah dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Upaya ini menunjukkan adanya konsistensi dan keberlanjutan dalam strategi peningkatan partisipasi politik di desa, di mana pengalaman dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya dijadikan pembelajaran untuk merancang program-program yang lebih efektif. Kampanye penyuluhan politik dan diskusi terbuka merupakan instrumen penting dalam pendidikan politik masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dalam deliberasi publik tentang isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan mereka.

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu MP



Sumber: Data Primer

Salah satu upaya konkret yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan sosialisasi di kantor balai desa terkait hak-hak politik masyarakat. Inisiatif ini sangat strategis karena menempatkan pemerintah desa sebagai agen utama dalam pendidikan politik dan mobilisasi partisipasi masyarakat. Penggunaan kantor balai desa sebagai venue sosialisasi juga simbolis, karena menunjukkan bahwa pemilu dan partisipasi politik adalah urusan resmi dan penting yang memerlukan perhatian serius dari institusi pemerintahan lokal. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat lebih terlibat dalam memahami pentingnya hak suara dalam menentukan masa depan negara dan masa depan Desa Poopo Barat secara khusus. Pendekatan ini mencerminkan

pemahaman bahwa partisipasi politik yang bermakna memerlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang signifikansi hak pilih mereka, bukan hanya sebagai kewajiban formal tetapi sebagai instrumen untuk mempengaruhi kebijakan dan arah pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Meskipun berbagai upaya telah dan akan dilakukan, tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tetap ada dan memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Keberhasilan upaya-upaya ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk kualitas penyampaian informasi, relevansi materi sosialisasi dengan kebutuhan dan konteks lokal masyarakat, serta kemampuan untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat termasuk kelompok-kelompok yang mungkin termarginalkan atau kurang terlibat dalam proses politik. Diperlukan juga evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan untuk meningkatkan dampaknya. Selain upaya formal dari pemerintah desa dan penyelenggara pemilu, peran tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan institusi keagamaan juga sangat penting dalam memobilisasi partisipasi dan membangun kesadaran politik masyarakat. Kolaborasi multi-stakeholder dalam mendorong partisipasi politik akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat yang memiliki komitmen terhadap penguatan demokrasi di tingkat lokal.

2. Pembahasan

a. Situasi Politik dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Temuan penelitian mengenai stabilitas situasi politik di Desa Poopo Barat sejalan dengan konsep konsolidasi demokrasi di tingkat lokal yang dikemukakan oleh Linz dan Stepan (1996), yang menekankan bahwa demokrasi yang terkonsolidasi ditandai oleh kemampuan sistem politik untuk menyelenggarakan pemilu secara damai dan teratur tanpa ancaman kekerasan atau ketidakstabilan. Stabilitas politik yang dialami Desa Poopo Barat dalam penyelenggaraan pemilu mencerminkan adanya institutional trust dan social cohesion yang relatif kuat di dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berada di tingkat desa, mekanisme demokrasi elektoral telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari rutinitas politik yang diterima oleh masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa konflik politik yang potensial dapat dikelola melalui mekanisme-mekanisme sosial dan kelembagaan yang ada, sehingga perbedaan preferensi politik tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang mengancam ketertiban sosial.

Namun demikian, stabilitas politik tidak otomatis menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini. Verba, Nie, dan Kim (1978) dalam teori partisipasi politik mereka menjelaskan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk sumber daya individual (seperti pendidikan dan ekonomi), rekrutmen politik, dan orientasi psikologis terhadap politik. Tingkat partisipasi yang masih perlu ditingkatkan di Desa Poopo Barat dapat dipahami dalam kerangka teori ini, di mana kemungkinan terdapat keterbatasan dalam sumber daya politik masyarakat atau lemahnya mekanisme mobilisasi yang efektif. Penelitian Huntington dan Nelson (1976) juga menggarisbawahi bahwa di negara-negara berkembang, partisipasi politik sering kali bersifat mobilized participation daripada autonomous participation, yang berarti partisipasi lebih banyak didorong oleh elite atau struktur kekuasaan daripada muncul dari kesadaran dan inisiatif mandiri masyarakat. Kondisi ini

mungkin juga terjadi di Desa Poopo Barat, di mana partisipasi yang ada mungkin lebih bersifat ritualistik atau mobilisasi dari atas daripada partisipasi yang didasarkan pada pemahaman politik yang mendalam dan kesadaran kritis akan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi.

Temuan tentang perlunya peningkatan partisipasi juga resonan dengan argumen Putnam (2000) tentang pentingnya modal sosial dalam mendorong civic engagement dan partisipasi politik. Modal sosial yang tinggi, yang ditandai dengan jaringan sosial yang kuat, kepercayaan interpersonal, dan norma-norma resiprositas, dapat menjadi katalisator bagi partisipasi politik yang lebih aktif. Dalam konteks Desa Poopo Barat, meskipun stabilitas politik mengindikasikan adanya kohesi sosial, namun hal ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi partisipasi politik yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial saja tidak cukup tanpa disertai dengan kesadaran politik, akses terhadap informasi, dan pemahaman tentang bagaimana partisipasi politik dapat membawa perubahan konkret dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi perlu fokus tidak hanya pada mobilisasi kuantitatif (meningkatkan jumlah pemilih yang datang ke TPS), tetapi juga pada peningkatan kualitas partisipasi melalui pendidikan politik yang komprehensif, pemberdayaan masyarakat untuk berpikir kritis tentang isu-isu politik, dan penciptaan ruang-ruang deliberasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara bermakna dalam proses politik.

b. Pengenalan Masyarakat Terhadap Calon Presiden, Wakil Presiden, dan Calon Legislatif

Tingkat pengenalan masyarakat Desa Poopo Barat terhadap calon presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa media massa, khususnya televisi, masih memainkan peran vital dalam diseminasi informasi politik ke daerah pedesaan. Temuan ini sejalan dengan teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw (1972), yang menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh publik melalui seleksi dan penekanan pada isu-isu tertentu. Dalam konteks pemilu, media televisi menjadi jendela utama bagi masyarakat pedesaan untuk mengakses informasi tentang kandidat dan isu-isu politik nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi proliferasi media digital, media konvensional seperti televisi masih menjadi sumber informasi yang dominan dan dipercaya oleh masyarakat pedesaan. Selain media massa, temuan penelitian juga mengungkapkan pentingnya komunikasi interpersonal dan diskusi informal di antara warga sebagai mekanisme penyebaran dan pembentukan opini politik, yang menurut Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet (1944) dalam teori two-step flow of communication, informasi dari media massa sering kali dimediasi oleh opinion leaders dalam komunitas lokal sebelum diterima oleh masyarakat luas.

Pengenalan masyarakat terhadap kandidat sebelum mereka secara resmi mencalonkan diri menunjukkan pentingnya political branding dan visibilitas publik jangka panjang dalam membentuk elektabilitas kandidat. Scammell (2015) menjelaskan bahwa dalam politik kontemporer, kandidat tidak hanya dinilai berdasarkan program dan janji kampanye, tetapi juga berdasarkan brand image yang telah terbentuk melalui eksposur media dan rekam jejak mereka di ranah publik. Dalam konteks Pemilu 2024 Indonesia, kandidat yang berkompetisi umumnya adalah figur-figur yang telah lama berkiprah di panggung politik nasional, sehingga masyarakat, termasuk di daerah pedesaan seperti Desa Poopo Barat, sudah memiliki familiarity dengan mereka. Familiarity ini dapat mempengaruhi preferensi pemilih melalui psychological bias seperti mere exposure effect, di mana individu cenderung mengembangkan preferensi terhadap sesuatu yang familiar bagi mereka. Untuk calon legislatif, strategi kampanye yang mengombinasikan media luar ruang (baliho) dengan pendekatan grassroot menunjukkan pemahaman akan pentingnya multi-channel campaign dalam menjangkau pemilih.

Pendekatan kampanye calon legislatif yang melibatkan kunjungan ke gereja dan partisipasi dalam acara kemasyarakatan mencerminkan strategi clientelistic politics dan retail politics yang masih sangat relevan dalam konteks politik Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Aspinall dan Berenschot (2019) dalam studinya tentang demokrasi elektoral di Asia Tenggara menunjukkan bahwa politik patron-klien dan strategi kampanye berbasis relasi personal masih menjadi karakteristik dominan dalam kompetisi elektoral di tingkat lokal. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh nilai-nilai komunalitas dan kedekatan personal, kehadiran fisik kandidat dalam ruang-ruang sosial dan keagamaan menjadi sangat penting untuk membangun trust dan rapport dengan konstituen. Stokes et al. (2013) juga menjelaskan bahwa dalam banyak demokrasi elektoral, terutama di negara berkembang, kampanye politik tidak hanya tentang persuasi ideologis atau programatik, tetapi juga tentang membangun jaringan personal, menunjukkan respek terhadap nilai-nilai lokal, dan menciptakan sense of connection antara kandidat dan pemilih. Strategi kampanye yang adaptif terhadap konteks sosial-kultural lokal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami modernisasi politik, praktik-praktik kampanye tradisional yang berbasis pada interaksi personal dan pemanfaatan institusi sosial lokal masih tetap efektif dan menjadi bagian integral dari proses elektoral di tingkat grassroot.

c. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Desa Poopo Barat, seperti kampanye penyuluhan politik dan diskusi terbuka, sejalan dengan konsep pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang ditekankan oleh Nie, Junn, dan Stehlik-Barry (1996) sebagai faktor penting dalam membangun partisipasi politik yang bermakna. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang prosedur teknis pemilu, tetapi juga untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana keputusan politik mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks Desa Poopo Barat, pendekatan melalui penyuluhan dan diskusi terbuka memungkinkan terjadinya dialogue dan exchange of ideas antara penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan warga, yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses demokrasi. Freire (1970) dalam konsep pendidikan pembebasan menekankan pentingnya pendidikan yang dialogis dan partisipatif, bukan hanya bersifat top-down, untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan sosialisasi tentang hak-hak politik masyarakat menunjukkan pentingnya local government sebagai agen demokrasi di tingkat grassroot. Teoritis institutional approach seperti North (1990) menekankan bahwa institusi formal dan informal memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa berfungsi sebagai institusi formal yang memiliki legitimasi dan otoritas untuk memobilisasi dan mengedukasi masyarakat tentang partisipasi politik. Penggunaan kantor balai desa sebagai venue sosialisasi juga strategis karena balai desa merupakan ruang publik yang netral dan accessible bagi seluruh lapisan masyarakat. Norris (2002) menjelaskan bahwa institutional design dan institutional performance dalam menyelenggarakan pemilu sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan, pada gilirannya, tingkat partisipasi politik. Ketika institusi lokal seperti pemerintah desa menunjukkan komitmen dan kapasitas dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang berkualitas, hal ini dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap sistem demokrasi dan mendorong partisipasi yang lebih aktif.

Namun demikian, efektivitas upaya-upaya peningkatan partisipasi bergantung pada keberlanjutan program dan kemampuan untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat secara

inklusif. Brady, Verba, dan Schlozman (1995) dalam civic voluntarism model menjelaskan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor utama: resources (seperti waktu, uang, dan keterampilan civic skills), psychological engagement (seperti minat terhadap politik), dan recruitment networks (seperti mobilisasi melalui organisasi sosial dan komunitas). Upaya peningkatan partisipasi perlu dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam ketiga dimensi ini. Misalnya, untuk masyarakat dengan keterbatasan resources, perlu ada strategi khusus untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pemilu tanpa beban yang berlebihan. Untuk meningkatkan psychological engagement, materi sosialisasi perlu dibuat relevan dengan isu-isu konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari, sehingga mereka dapat melihat kaitan langsung antara partisipasi politik mereka dengan perbaikan kehidupan. Sementara itu, untuk memperkuat recruitment networks, kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, kelompok keagamaan, dan tokoh informal di desa sangat penting. Mansuri dan Rao (2013) dalam studinya tentang partisipasi lokal di negara berkembang juga menekankan pentingnya context-specific approach yang mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan kultural lokal dalam merancang program peningkatan partisipasi. Dengan demikian, upaya peningkatan partisipasi politik di Desa Poopo Barat perlu terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang partisipasi masyarakat Desa Poopo Barat dalam Pemilu 2024 mengungkapkan beberapa temuan penting yang berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika demokrasi elektoral di tingkat grassroot. Pertama, meskipun situasi politik di desa ini relatif stabil dan penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan baik, tingkat partisipasi masyarakat masih memerlukan peningkatan, mengindikasikan bahwa stabilitas politik saja tidak cukup untuk menjamin partisipasi demokratis yang optimal. Kedua, masyarakat memiliki tingkat pengenalan yang cukup baik terhadap calon presiden, wakil presiden, dan calon legislatif melalui kombinasi media massa, komunikasi interpersonal, dan strategi kampanye yang adaptif terhadap konteks lokal, menunjukkan bahwa informasi politik telah dapat menjangkau daerah pedesaan meskipun dengan tantangan tertentu. Ketiga, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kampanye penyuluhan politik, diskusi terbuka, dan sosialisasi hak-hak politik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, mencerminkan komitmen institusi lokal dalam memperkuat demokrasi partisipatif.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan strategi peningkatan partisipasi politik di tingkat lokal. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek kuantitatif partisipasi tetapi juga pada kualitas partisipasi melalui pendidikan politik yang mendalam, pemberdayaan masyarakat untuk berpikir kritis, dan penciptaan ruang deliberasi publik yang inklusif. Kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah desa, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan institusi keagamaan sangat penting untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat di tingkat desa. Penelitian ini juga menyarankan perlunya penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi partisipasi politik di desa ini, termasuk aspek-aspek seperti peran media sosial, pengaruh struktur sosial tradisional, dan dinamika ekonomi-politik lokal, sehingga dapat dirancang intervensi yang lebih efektif dan kontekstual untuk memperkuat demokrasi di tingkat *grassroot*.

E. Daftar Pustaka

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the

- State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. *American Political Science Review*, 89(2), 271-294.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Fitriyah. (2020). Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu di Pedesaan: Tantangan dan Hambatan. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(1), 45-62.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1944). *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York: Columbia University Press.
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832-857.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington DC: World Bank Publications.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Nie, N. H., Junn, J., & Stehlik-Barry, K. (1996). *Education and Democratic Citizenship in America*. Chicago: University of Chicago Press.
- Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Sarbaugh, M. (2023). Electoral Participation in Contemporary Democracies: Trends and Patterns. *Journal of Democracy Studies*, 12(3), 112-135.
- Scammell, M. (2015). Politics and Image: The Conceptual Value of Branding. *Journal of Political Marketing*, 14(1-2), 7-18.
- Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row.
- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. (1978). *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in*

American Politics. Cambridge: Harvard University Press.